

BAB IV
KIPRAH POLITIK AMIR SYARIFFUDIN PADA PEMERINTAHAN
SUTAN SJAHRIR DAN PADA MASA MENJABAT
PERDANA MENTERI

A. Amir Syariffudin ketika menjabat Menteri Penerangan Dan Menteri Keamanan Rakyat Pada Pemerintahan Sutan Sjahrir

1. Amir Syariffudin sebagai Menteri Penerangan

Amir Syariffudin tidak lama menjabat sebagai menteri penerangan hanya selama dua bulan karena jabatannya digantikan oleh M. Natsir. Kementerian Penerangan dilepaskannya pada tanggal 3 Januari 1946.¹ Amir Syariffudin mulai mengatur kementerian yaitu sebagai pusat penerangan Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Amir Syariffudin berusaha menjalankan kementeriannya agar dapat menjadi suatu kementerian yang efektif bagi penerangan tentang arti dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tugas pokok yang dikerjakan Amir Syariffudin dalam kementrian ini adalah 1) Memberi penerangan ke luar negeri tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan cita-cita revolusi serta ideologi negara Pancasila melalui radio *Voice of Free Indonesia* dan penerbitan-penerbitan. 2) Memberi penerangan di dalam negeri dengan berbagai cara lain dengan mengirimkan petugas ke daerah untuk menanamkan pengertian, menyebarkan arti proklamasi dan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.²

¹ Frederick D. Wellem, *Amir Sjarifoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 142.

² Kementerian Penerangan, *Dua Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid IX, 1993, hlm. 10.

Selanjutnya tenaga-tenaga dalam menteri penerangan yang pertama dibagi ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. 1) Kelompok tenaga pemuda yang melakukan perjuangan di bawah tanah untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 2) Kelompok yang menggunakan kedudukannya sebagai pegawai *Sendenbu* dan *Hosokyoku* pada pemerintahan Jepang untuk menyebarkan kesadaran nasional. 3) Kelompok politisi yang banyak berjuang dalam pergerakan kebangsaan menentang penjajah dan yang tertarik oleh pekerjaan penerangan.³

Awal dibentuknya republik, kementerian penerangan merupakan kementerian yang terpenting dan memiliki pekerjaan sangat luas. Karena kementerian belum terorganisasi dengan baik maka pekerjaan yang tidak dapat ditampung dalam kementerian yang lainnya akan diserahkan kepada kementerian penerangan. Dengan melihat banyaknya bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian ini nampaknya kepercayaan pemerintah kepada Amir Syariffudin sangatlah besar. Memang beliau merupakan pejuang yang militan dan tokoh yang sangat terkemuka.⁴

2. Amir Syariffudin sebagai Menteri Keamanan

Dalam Kabinet Sjahrir, Amir Syariffudin juga diangkat menjadi menteri keamanan rakyat. Kementerian keamanan dipegangnya sampai dengan pembubaran kabinetnya sendiri yakni mulai pada tanggal 14 November 1947 hingga tanggal 23 Januari 1948.⁵

³ *Ibid*, hlm. 8.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 150.

Pengangkatan Amir Syariffudin sebagai Menteri Keamanan Rakyat pada awalnya diwarnai dengan pro dan kontra dalam masyarakat.⁶ Kalangan tentara menolak pengangkatan tersebut karena kalangan tentara menginginkan pengangkatan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat. Keinginan tentara tersebut berdasarkan hasil musyawarah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen dari seluruh Jawa dan Sumatera pada tanggal 12 November 1945.⁷ Isi musyawarah tersebut adalah mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat dan Kolonel Sudirman diangkat sebagai panglima besar serta Urip Soemohardjo diangkat sebagai kepala umum staf TKR. Selain itu TKR juga keberatan apabila menteri keamanan rakyat diduduki oleh Amir Syariffudin dengan alasan sebagai berikut. 1) Mereka telah bermusyawarah dan sepakat mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat. Penunjukkan dengan cara musyawarah telah menjadi kebiasaan di kalangan tentara dalam memilih pimpinan mereka. 2) Amir Syariffudin tidak mempunyai pengalaman militer baik pada waktu penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang. 3) Amir Syariffudin adalah seorang yang beragama Kristen sedangkan sebagian besar anggota tentara beragama Islam.⁸

⁶ Jaques Leclerc, *Mencari Kiri Kaum Revolusi Indonesia dan Revolusi Mereka*, Jakarta: Marjin Kiri, 2011, hlm. 69.

⁷ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 145.

⁸ A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia Jilid I-II*, Bandung: Seruling Masa, 1968, hlm. 241.

Akhirnya Sjahrir tetap pada pendiriannya untuk menunjuk Amir Syariffudin sebagai menteri keamanan rakyat. Setelah Amir Syariffudin menduduki jabatannya maka ia menyatakan konsepnya tentang tentara. Tentang dasar TKR, Amir Syariffudin mengemukakan bahwa harus ada perbedaan antara TKR dengan kesatuan tentara yang ada sebelumnya, yaitu KNIL dan PETA. Bagi Amir Syariffudin KNIL telah dipergunakan oleh Belanda untuk memecah persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dasar bagi orang Indonesia yang masuk KNIL hanyalah mencari uang makan, keyakinan politik tidak mereka kuasai.⁹

Untuk anggota PETA dikatakan bahwa anggota tersebut dipaksa oleh Jepang dan bukan secara sukarela. Mereka sama seperti KNIL tidak memiliki keyakinan politik dan hanya dijadikan boneka oleh Jepang. Pemberontakan yang dilaksanakan oleh PETA menunjukkan tidak adanya keyakinan politik di dalam PETA. Amir Syariffudin beranggapan bahwa pemuda yang masuk TKR harus berbeda dengan kedua jenis kesatuan tentara tadi. TKR harus mempunyai dasar dan keyakinan politik. Keyakinan politik adalah keinginan untuk menyumbangkan apa saja yang ada padanya untuk menjaga keamanan negaranya. Tentara yang dimaksud Amir Syariffudin adalah tentara yang berdisiplin, berdedikasi dan militan serta mempunyai semangat patriot yang tinggi.¹⁰

Amir Syariffudin juga menginginkan adanya jurang pemisah antara tentara dan rakyat. Tentara tidak boleh merasa bahwa mereka mempunyai kuasa atas lembaga pemerintahan sipil. Tentara tugasnya bukanlah untuk menindas rakyat

⁹ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 151.

¹⁰ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 129-132.

ataupun menakut-nakuti rakyat. TKR harus menjamin akan adanya keamanan dan ketentraman di antara rakyat serta menjadi pelindung rakyat. Berdasarkan konsep tersebut maka Amir Syariffudin mulai mengatur TKR. Pada tanggal 1 Januari 1946 TKR diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) melalui Penetapan Pemerintah No.2/SD.1946, atas usul Menteri Pertahanan Amir Syariffudin.¹¹ Sejak saat itu Kementerian Keamanan disebut Kementerian Pertahanan. Kedudukan TKR ditegaskan sebagai alat negara, alat Republik Indonesia, yang harus patuh kepada pimpinan negara yaitu Pemerintah Republik Indonesia.¹²

Tanggal 26 Januari 1946 nama TKR diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sekarang kedudukan tentara lebih tegas lagi yaitu menjadi satu-satunya militer dalam Republik Indonesia. Untuk merumuskan susunan dan bentuk ketentaraan maka dibentuk sebuah panitia yang terdiri dari Urip Soemohardjo, Suridarma, Kartasasmita, Mustopo, Sutirto, Sundjojo, Hollan Iskandar, Simatupang, Supomo dan Roosseno. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia telah menyelesaikan tugasnya dan mereka menyampaikan usul-usul mengenai bentuk Kementerian Pertahanan, bentuk ketentaraan, organisasi tentara, kekuatan tentara, kedudukan lasykar, dan barisan bersenjata dari badan yang bukan badan pemerintah.¹³

¹¹ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 14.

¹² *Ibid*, hlm. 258-259.

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV*, 1976, hlm. 245-246.

Usaha penyatuan lasykar dan barisan perjuangan lainnya ke dalam TRI tidak berhasil dengan jalan musyawarah bersama sehingga ditempuhlah jalan dekrit. Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya yang berisi bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lasykar dan barisan perjuangan lainnya dimasukkan TRI. Untuk pelaksanaannya diangkat sebuah panitia sebagai berikut.

Ketua : Presiden Soekarno
Wakil Ketua I : Wakil Presiden Mohammad Hatta
Wakil Ketua II : Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin
Wakil Ketua III : Panglima Besar Sudirman
Anggota : Pimpinan tentara, lasykar dan barisan perjuangan

Sesudah panitia bekerja beberapa minggu maka dikeluarkan Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 sebagai berikut.

- a. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya “Tentara Nasional Indonesia”.
- b. Segenap anggota Angkatan Perang yang ada sekarang dan segenap angkatan lasykar yang bersenjata, baik yang sudah atau yang tidak bergabung di dalam Biro Perjuangan, mulai saat ini dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.
- c. Pimpinan tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia dipegang oleh.

1) Kepala : Panglima Besar Angkatan Perang.

2) Anggota : Letnan Jenderal Urip Sumohardjo.

Laksamana Muda Nazir

Komodor Muda S. Suriadarma

Sutomo

Ir.Sakirman

Djokosujono

- d. Pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban yang mengenai siasat dan organisasi Tentara Nasional Indonesia, selama proses penyempurnaan Tentara Nasional Indonesia sedang berjalan.
- e. Semua satuan Angkatan Perang dan satuan lasykar yang mulai hari tanggal penetapannya ini menjelma menjadi satuan Tentara Nasional Indonesia, diwajibkan saat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia.¹⁴

Dengan demikian semua lasykar diintegrasikan ke dalam TNI, namun usaha ini berjalan lamban karena tidak lama kemudian Belanda mengadakan agresi militernya yang pertama. Usaha ini kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh pengganti-penggantinya. Amir Syariffudin juga pernah diangkat oleh tentara Siliwangi untuk menjadi militer dengan pangkat kolonel, namun pangkat tersebut tidak pernah dipergunakan.¹⁵

B. Amir Syariffudin pada masa menjabat Perdana Menteri

1. Program dan Kabinet Amir Syariffudin

Masa akhir kabinet Sjahrir ditandai dengan penyerbuan Belanda. Akibatnya, pertahanan RI yang terdiri dari beberapa divisi harus mundur. Dalam waktu singkat, kota-kota besar di daerah-daerah strategis Jawa Barat, Jawa

¹⁴ A.H,Nasution, *op.cit.*, hlm. 83-87.

¹⁵ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 14.

Tengah, dan Jawa Timur jatuh. Sisa wilayah RI adalah daerah Banten, Jawa Tengah bagian tengah dan timur, serta Jawa Timur bagian barat. Umumnya, daerah-daerah ini padat dan miskin. Sasaran strategi Belanda adalah untuk membuka daerah-daerah ekonomis sebagai pangkalan dongkrak.¹⁶

Setelah Kabinet Sjahrir jatuh maka presiden Soekarno mengundang para pemimpin partai politik untuk membicarakan pembentukan kabinet yang baru. Presiden memerintahkan kepada Amir Syarifuddin (Partai Sosialis), Sukiman (Masyumi), A.K. Gani (PNI) dan Setiajit (PBI) untuk membentuk kabinet yang baru tersebut. Perintah Presiden meminta agar pada tanggal 1 Juli 1947 sebelum jam 18.00 para pemimpin partai politik tersebut sudah mengajukan susunan kabinet yang baru.¹⁷

Selanjutnya para pemimpin partai politik tersebut mengadakan perundingan dalam hal pengajuan susunan kabinet yang baru. Masyumi menuntut agar kursi perdana menteri, kementerian dalam negeri serta dua kursi lainnya diberikan kepada Masyumi. Tentunya tuntutan dari partai Masyumi tersebut tidak disetujui oleh para pemimpin partai politik yang lainnya. Dan pada akhirnya mandat untuk membentuk kabinet tersebut kembali diserahkan kepada presiden Soekarno. Kemudian presiden Soekarno menunjuk ketiga pimpinan partai yaitu Amir Syarifuddin, Gani, dan Setiajit untuk membentuk susunan kabinet baru tanpa mengikut sertakan Masyumi. Pada tanggal 3 Juli 1947 dilantiklah kabinet yang

¹⁶ Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang, 2006, hlm. 124.

¹⁷ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* jilid VIII, Bandung: Amgkasa, 1978, hlm. 48.

baru dan Amir Syariffudin ditunjuk sebagai perdana menteri sekaligus merangkap sebagai menteri pertahanan.¹⁸

Kabinet Amir Syariffudin yang pertama ini merupakan kabinet koalisi nasional yang kuat karena semua partai dan golongan mendapat pembagian kursi. Karena Masyumi menolak untuk turut serta dalam kabinet Amir Syariffudin, maka jatah kursi Masyumi diberikan kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pembagian kursi-kursi dalam kabinet Amir Syariffudin antara lain Partai Sosialis mendapatkan 6 kursi, PNI mendapatkan 7 kursi, Non-partai mendapatkan 5 kursi, PBI mendapatkan 4 kursi, sedangkan partai Parkindo, PKRI, PKI, SOBSI, golongan pemuda dan Cina masing-masing mendapatkan 1 kursi dan jumlah menteri 34 orang.¹⁹

Susunan kabinet Amir Syariffudin adalah terdiri dari Setiadjid (PBI) menjadi wakil PK, Mr.Abdulmadjid sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Mr.Tamzil (Partai Sosialis) sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Dr.A. Tjokronegoro (Partai Sosialis) sebagai Menteri Muda Urusan Ekonomi, Dr. Ong Eng Djie sebagai Menteri Muda Keuangan, Dr. Satrio (PBI) sebagai Menteri Muda Kesehatan, Suprodjo (PBI) sebagai Menteri Sosial, S.K. Trimurti (YPSI) sebagai Menteri Perburuhan, Wikana (Komunis) sebagai Menteri Pemuda, Sojas (BTI) sebagai Menteri Negara bersama dengan Siauw Giek Tjhan (eks.BTI) dan Maruto Darusman (PKI). Penempatan pejabat-pejabat tinggi dan penting tetap

¹⁸ Jaques Leclerc, *op.cit.*, hlm. 88.

¹⁹ Kementerian Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia: 1945-1970*, Jakarta, 1970. hlm. 6.

dimonopoli pihak komunis. Sementara itu, Soeripno dijadikan duta keliling Indonesia di luar negeri.²⁰

Kabinet Amir Syariffudin mengumumkan program politik luar negeri adalah sebagai berikut. 1) Mempertahankan pengakuan *de facto* Negara Republik Indonesia. 2) Berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan secara damai Persetujuan Linggarjati. 3) Berusaha agar Indonesia secepat mungkin harus ikut serta dalam persoalan hidup internasional sesuai dengan kepentingan kedudukannya dalam dunia.²¹

Sedangkan program politik dalam negeri dari kabinet Amir Syariffudin adalah sebagai berikut. 1) Menyempurnakan pemusatan tenaga rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan tanah air. 2) Memperbaiki susunan perwakilan rakyat di pusat dan di daerah secara demokratis dengan pemilihan demokratis yang dijalankan segera apabila keadaan masyarakat telah mengizinkan dengan nyata. 3) Meneruskan usaha menyempurnakan susunan pemerintah *collegial* dan seterusnya menjalankan politik menempatkan pegawai yang sesuai dengan pertahanan dan pembangunan negara. 4) Menyempurnakan dan memperkuat polisi negara sehingga menjadi satu alat negara yang melindungi hak-hak demokratis dan menjamin keamanannya.²²

Selanjutnya pemerintahan Amir Syariffudin segera mengadakan kontak diplomatic dengan Belanda. Dengan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda

²⁰ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 125.

²¹ A.H. Nasution, *op.cit.*, jilid V, hlm. 50-51.

²² *Ibid.*

ini, Amir Syariffudin sangat percaya pada bantuan dari Pemerintah Amerika. Kabinet Amir Syariffudin percaya bahwa Amerika sendiri mempunyai kepentingan di Indonesia yaitu Amerika menganggap keamanan di Indonesia sebagai faktor penting untuk stabilitas politik dan ekonomi dunia. Amerika takut kalau pengaruh komunis makin meluas di Asia Tenggara.²³ Pemerintah Amir Syariffudin segera menyampaikan notanya kepada Belanda sebagai berikut.

- a. Kita tetap ingin meneruskan perdamaian dan menyelesaikan peristiwa ini dengan damai.
- b. Kita menyetujui secepatnya dibentuk pemerintah peralihan dan wakil mahkota duduk di dalamnya dengan kedudukan istimewa dan kekuasaan *de jure*.
- c. Kedudukan republik sebagai yang diakui pemerintah diberi tempat yang sesuai dengan pengakuan *de facto* menurut persetujuan Linggarjati. Kekuasaan *de facto* republik dapat menjadi pedoman untuk pemerintah Belanda, lebih-lebih karena kekuasaan *de facto* Republik telah memperoleh tempat dan penghargaan di dalam pergaulan internasional.
- d. Kekuasaan *de facto* republik seperti yang tergambar itu menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam perundangan kedua belah pihak.
- e. Pengakuan kedaulatan Belanda *de jure* di dalam zaman peralihan harus berakhir selambat-lambatnya tanggal 01 Januari 1949 dan setelah masa peralihan berakhir, maka RIS harus benar-benar berbentuk negara serikat yang berdaulat.
- f. Berkenaan dengan soal keamanan dan ketertiban dalam negeri, pemerintah republik tetap berpendirian seperti telah tertera dalam nota Paduka Yang Mulia Presiden Republik pada tanggal 27 Juni 1947.
- g. Penyerahan hak milik asing akan dapat segera dijalankan kecuali yang dahulu menjadi hak milik Pemerintah Hindia Belanda akan langsung dikuasai republik.
- h. Mengingat pendirian Belanda yang menyatakan bahwa kini keadaan kita benar-benar di dalam kegentingan, maka kepada segenap rakyat, perdana menteri menganjurkan supaya tetap bersatu, tenang, siap, dan waspada. Kita sekuat-kuatnya akan mencari jalan damai.²⁴

²³ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 160.

²⁴ A.H. Nasution, *op.cit.*, Jilid V, hlm. 52.

Dalam nota tersebut, pemerintah memberikan konsesi kepada Belanda yaitu menyetujui pembentukan suatu pemerintahan peralihan dengan wakil mahkota Belanda mempunyai kedudukan istimewa dan kekuasaan *de jure*. Hal yang masih dipertahankan oleh pemerintah adalah pengakuan *de facto* dan penjagaan keamanan dalam negeri adalah urusan Republik sendiri.²⁵ Sekalipun Amir Syariffudin telah memberikan konsesi-konsesi kepada Belanda namun Belanda tetap menolak.

Tuntutan Belanda dijawab RI bahwa pemerintah menyetujui pembentukan direktorat bersama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Selain itu Belanda menyadari bahwa mereka berada dalam kedudukan kuat sehingga terus mendesak. Belanda menghendaki agar RI hanya merupakan negara bagian dari sebuah negara federal dan dalam masa peralihan agar Belanda mempunyai kedaulatan atas seluruh wilayah Hindia Belanda.²⁶ Hal ini berarti RI akan kehilangan kekuasaan *de facto* dan *de jure* sekaligus.

Namun Amir Syariffudin tetap pada pendiriannya bahwa republik harus diakui secara *de facto* dan penjagaan keamanan dalam negeri adalah urusan Republik sendiri, sehingga Belanda mulai menekan republik dengan kekuatan militernya. Belanda menuntut agar RI harus menghentikan blokade pemasukan bahan makanan dan perbaikan lalu lintas sepanjang garis demarkasi dan hubungan dengan luar negeri harus dibatalkan. Tuntutan Belanda semakin banyak karena mengetahui republik dalam keadaan yang lemah.

²⁵ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 161.

²⁶ *Ibid*, hlm. 162.

Tuntutan tersebut dibarengi dengan tekanan militer sehingga keadaan semakin genting. Amir Syariffudin sadar bahwa kekuatan dan pertahanan TNI tidak cukup untuk menghadapi agresi militer Belanda yang diperlengkapi dengan persenjataan modern. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Amir Syariffudin agar sedapat mungkin penyelesaian pertikaian ini dapat dilakukan agar sedapat mungkin penyelesaian pertikaian ini dapat dilakukan dengan jalan damai, tanpa memakan banyak korban yang berjatuh di antara kedua belah pihak.²⁷

Pada tanggal 14-17 Juli, Amir Syariffudin, A.K. Gani, Setiadjit, dan Leimena berada di Jakarta untuk berunding dengan Belanda yang diwakili oleh H.J. van Mook, Schermerhorn, van Poll, Idenburg, dan Koets. Pokok perundingan adalah mengenai penyelesaian keadaan sekitar garis demarkasi, Belanda memberikan usul baru sebagai berikut. 1) Dibentuk suatu direktorat bersama di dalam pemerintahan peralihan. 2) Kesatuan polisi Belanda ditempatkan dalam negeri untuk membantu keamanan di dalam negara bagian. 3) Menempatkan orang Belanda dalam pimpinan dan pendidikan korps polisi. 4) Menghentikan semua permusuhan di semua front. 5) Tentara kedua belah pihak diundurkan 10 kilometer dari garis demarkasi yang harus dilakukan lebih dahulu oleh tentara Republik dan kemudian oleh tentara Belanda dan selanjutnya tentara masing-masing dimasukkan ke dalam garnizun, sedang daerah demarkasi dijaga oleh polisi bersama.

Amir Syariffudin segera kembali ke Yogyakarta untuk membahas usul baru dari Belanda tersebut dan republik memberikan jawaban sebagai berikut.

²⁷ *Ibid*, hlm. 162.

1)Pembentukan badan bersama untuk membuat peraturan-peraturan keamanan yang terdiri dari wakil-wakil Negara-negara bagian dan Belanda, ditempatkan pada pusat pemerintahan peralihan. 2) Keamanan dalam Negara-negara bagian tetap menjadi tanggung jawab Negara-negara sendiri. 3) Bantuan dari tenaga-tenaga ahli Belanda dapat diterima atas permintaan Negara-negara bagian itu sendiri.²⁸

Keinginan RI untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dengan jalan damai mengalami kegagalan karena pada tanggal 20 Juli 1947 lewat tengah malam Perdana Menteri Beel menjelaskan bahwa pemerintah Belanda pada malam itu telah memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal H.J. van Mook untuk menggunakan tentara Belanda guna melaksanakan suatu aksi polisional. Pada malam itulah juga Belanda telah melakukan aksi militernya di Jakarta dengan menduduki kantor-kantor republik. Wakil Perdana Menteri A.K. Gani, Menteri Muda Luar Negeri Tamzil, Walikota Jakarta Suwirjo, Sekretaris Dewan Kabinet Ali Budiardjo ditangkap dan ditawan oleh Belanda.

Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI di mana-mana pertahanan TNI dipukul mundur sedangkan tentara Belanda berhasil menguasai daerah-daerah RI. Atas agresi militer Belanda tersebut Perdana Menteri Amir Syariffudin berpidato di radio, Amir Syariffudin menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam waktu yang singkat ini, Belanda mampu mencapai banyak tujuan akhir geografisnya, mereka

²⁸ *Ibid*, hlm. 163.

tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu menghancurkan organisasi utama pasukan bersenjata Republik.²⁹

Dalam pidato di radio tanggal 22 Juli 1947, Amir Syariffudin juga meminta perhatian dunia untuk memberikan bantuan supaya pertikaian ini dapat segera di akhiri. Amir Syariffudin menyatakan bahwa perselisihan politik antara Indonesia-Belanda akan mengganggu perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Selain itu Amir Syariffudin juga meminta intervensi PBB terhadap serangan Belanda tersebut atas Republik Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 1947.³⁰

Seruan Perdana Menteri Amir Syariffudin dan Presiden Soekarno mendapat tanggapan dari Negara-negara di Timur Tengah, Polandia, Amerika, Australia, India dan sebagainya. Amerika menawarkan jasanya untuk menjadi penengah dalam perselisihan ini dan Indonesia meminta Amerika untuk mendesak PBB untuk membentuk panitia perundingan. Pada tanggal 30 Juli 1947 India dan Australia mendesak Dewan Keamanan PBB agar masalah agresi militer Belanda atas Republik Indonesia dijadikan mata acara perdebatan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.³¹

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut menghasilkan resolusi agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan dan konsul-konsul Negara asing

²⁹ George M. C Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, UNS Press, 1995, hlm. 268.

³⁰ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 167.

³¹ George M. C Kahin, *op.cit.*, hlm. 270.

yang berada di Jakarta akan mengadakan penyelidikan tentang keadaan yang sebenarnya. Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut tiba di Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 1947.³²

Setelah datangnya Resolusi Dewan Keamanan PBB, Amir Syarifudin berpendapat bahwa beribu-ribu pemuda Indonesia yang ditahan Belanda dapat dibebaskan, tentara Belanda harus ditarik ke garis demarkasi yang ditetapkan, pegawai RI yang ditahan Belanda harus dikembalikan pada kedudukannya yang semula dan segala propaganda Belanda yang menjelekkan Indonesia harus segera dihentikan.

Perdana Menteri Amir Syarifudin menyampaikan pengumuman resmi kepada PBB yang intinya menyatakan bahwa Republik Indonesia telah memerintahkan penghentian permusuhan. Republik juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar segera mengirim suatu panitia untuk mengawasi pelaksanaan penghentian permusuhan supaya berjalan dengan baik.³³

Gubernur H.J. van Mook dari Jakarta mengumumkan penghentian permusuhan kepada pasukan Belanda, namun usaha pembersihan dalam wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda sejak 21 Juli terus dilaksanakan, bahkan pasukan Belanda terus menyelusup ke daerah republik. Karena banyaknya terjadi pertempuran-pertempuran, Pemerintah Republik pun mencatat pelanggaran-pelanggaran Belanda dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.

³² Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 169.

³³ A. H. Nasution, *op.cit.*, Jilid V, hlm. 335.

Akhirnya Dewan Keamanan PBB campur tangan lagi dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan tiga negara yakni Belgia yang merupakan pilihan dari Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai wakil dari PBB. Komisi ini terdiri dari Prof. Frank Graham (USA), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia).³⁴ KTN kemudian mengadakan perundingan lanjutan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini berjalan lambat. Kedudukan delegasi Indonesia melemah, namun para pemimpin sayap kiri sesuai dengan hasil evaluasi tetap berpendapat bahwa perundingan tetap merupakan jalan yang paling baik.³⁵ Komisi Tiga Negara mulai bekerja pada bulan September 1947, usaha KTN tersebut membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan di atas kapal “USS Renville”.

Amir Syarifuddin mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Di hadapan Badan Pekerja KNIP, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menerangkan politik pemerintah dalam menghadapi perundingan dengan Belanda. Politik pemerintah adalah sebagai berikut. 1) Agar Belanda mengakui RI secara *de facto* dan secara *de jure*. 2) Pasukan Belanda harus ditarik kembali ke garis demarkasi pada tanggal 14 Oktober 1946 atau sekurang-kurangnya keadaan tanggal 20 Juli 1947. 3) Menuntut seterusnya agar pasukan Belanda diundurkan dari seluruh daerah republik dan di kemudian hari dari seluruh Indonesia.³⁶

³⁴ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 170.

³⁵ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 126.

³⁶ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 171.

Untuk menghadapi perundingan dengan Belanda maka Amir Syariffudin meminta kepada Masyumi untuk turut serta dalam kabinet. Permintaan Amir Syariffudin tersebut dipenuhi oleh Masyumi tanpa menuntut suatu apapun juga karena mengingat keadaan republik yang sedang sangat genting. Oleh karena itu kabinet Amir Syariffudin diubah susunannya pada tanggal 11 November 1947. Komposisinya sebagai berikut: Partai Sosialis sebanyak tujuh orang, PNI sebanyak delapan orang, PSII sebanyak tiga orang, Masyumi sebanyak lima orang, PBI sebanyak empat orang, golongan Cina, pemuda, SOBSI, Parkindo, PKRI, PKI masing-masing satu orang dan non partai empat orang.³⁷

2. Amir Syariffudin dalam Perundingan Renvile

Seperti Sutan Sjahrir yang berhadapan dengan perundingan Linggarjati, Amir Syariffudin sendiri dihadapkan dengan perundingan Renvile. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara dilaksanakan di atas kapal Amerika USS Renvile, yang di labuhkan di Tanjung Priok Jakarta. Dimana Amir Syariffudin meminta kepada dewan keamanan PBB agar tempat perundingan harus diadakan di luar daerah pertikaian.³⁸

Perundingan dibuka pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syariffudin, Wakil Ketua Ali Sastromidjojo, anggotanya adalah Sutan Sjahrir, Tjoa Sek Ien, Mr. Narsoen, Ir.Djuanda. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wirjoatmodjo, Wakil

³⁷ Kementerian Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia: 1945-1970*, Jakarta, hlm. 7.

³⁸ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 172.

ketua H.L.K.F van Vredenburg, tujuh orang anggota, dua orang sekretaris dan tiga orang pembantu.³⁹

Dalam perundingan ini delegasi Belanda menuntut agar perundingan terlebih dahulu menyelesaikan masalah gencatan senjata dan sesudah itu barulah masalah politik. Sedangkan pihak RI menuntut sebaliknya karena beranggapan masalah permusuhan akan selesai dengan sendirinya kalau telah ada penyelesaian secara politik.⁴⁰ Pihak Belanda tidak mau mundur dengan tuntutananya. Sehingga diadakanlah perundingan antara Komite Teknis pihak Indonesia yang diketuai oleh Dr. J. Leimena dengan komite teknis Belanda yang dipimpin oleh van Vredenburg. Perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu karena Belanda menolak tuntutan Komisi Teknis Indonesia agar tentara Belanda ditarik kembali hingga garis demarkasi yang telah disepakati bersama pada 14 Oktober 1946. Pihak Belanda menuntut garis demarkasi sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai oleh tentara Belanda pada tanggal 28 Agustus 1947. Garis ini disebut oleh Belanda sebagai garis Van Mook.

Perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu maka KTN pada tanggal 3 Desember mengajukan usul sebagai berikut.

- a. Bahwa kedua belah pihak akan memberikan sebuah peta kepada KTN dimana ditetapkan daerah-daerah yang dikosongkan yang akan menjadi batas antara daerah-daerah yang dikuasai masing-masing pihak.

³⁹ A.H. Nasution, *op.cit.*, Jilid VI, hlm. 51-52.

⁴⁰ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 173.

- b. Bahwa kedua belah pihak akan memajukan alasan-alasanya kepada KTN atas dasar apakah daerah-daerah yang dikosongkan itu dimajukan oleh masing-masing komisi.
- c. Bahwa kedua belah pihak dalam menyusun alasan-alasan dan usul-usul yang akan diajukan kepada wakil KTN harus mengingat factor sebagai berikut.
- 1) Kedudukan tentara masing-masing pada tanggal 4 Agustus 1947
 - 2) Keadaan rakyat di daerah-daerah tersebut.
 - 3) Keadaan administrasi pemerintahan pada tanggal 4 Agustus dan 20 November di dalam atau di luar daerah-daerah yang akan dikosongkan menurut yang diusulkan kedua belah pihak.
 - 4) Sifat topografi dan geografi daripada daerah-daerah yang akan dikosongkan seperti yang diusulkan. Demikian juga keadaan di distrik-distrik di sekitarnya.
 - 5) Ditunjukan daerah-daerah mana yang bersamaan pada daerah-daerah yang dikosongkan itu, jika mengingat faktor-faktor yang disebut dalam sub b, c dan d.⁴¹

Sekali lagi republik menyatakan bersedia menerima usul-usul KTN yang baru ini. Pihak Belanda menolak usul-usul baru ini karena masih memegang garis demarkasi tertanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu pertempuran antara Indonesia dan Belanda terus saja berjalan. Mojokerto, Malang Selatan, Ambarawa dan daerah Siak di Sumatra diserang oleh Belanda.

⁴¹ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 434-435.

Pada tanggal 25 Desember 1947 pihak KTN mengajukan usul baru berupa senjata baru, yang dikenal dengan Usul-usul Hari Natal.⁴² Usul-usul tersebut memuat hal-hal yang didalam bidang militer mendekati tuntutan Belanda, sedangkan dalam bidang politik membayangkan suatu cara yang demokratis yang bagi republik memberikan harapan bagi daerah yang sudah lepas dari kekuasaannya akan diperoleh kembali. Pokok-pokok usulannya sebagai berikut.

- 1) Pengunduran tentara Belanda ke tempatnya pada tanggal 21 Juli (kedudukan sebelum agresi militer) dalam tempo tiga bulan.
- 2) Pengakuan oleh pihak republik garis demarkasi yang ditetapkan sendiri oleh van Mook pada tanggal 29 Agustus.
- 3) Demiliterisasi di antara kedua garis demarkasi di atas serta menempatkan pegawai-pegawai sipil republik di situ.⁴³

Usul-usul ini diterima oleh republik sedangkan pihak Belanda menolak usul KTN serta mengajukan beberapa amandemen yang terdiri dari 12 prinsip politik yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahwa garis demarkasi van Mook tidak dapat dirubah, tidak ada penarikan tentara Belanda dari posisi ini dan tidak ada pengembalian alat-alat pemerintah sipil RI ke daerah yang direbut Belanda.
- 4) Pembentukan pemerintah federal untuk masa peralihan dalam mana tidak ada perbedaan antara RI dan Negara bagian lainnya.
- 5) Penduduk akan melakukan pernyataan suara secara bebas tentang kehendaknya mengenai hubungan terhadap NIS yang akan dibentuk, dalam waktu paling cepat enam bulan dan paling lambat

⁴² Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 175.

⁴³ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 442.

satu tahun sesudah penandatanganan persetujuan. Untuk ini sebelumnya harus dijamin kebebasan bersidang dan berbicara.⁴⁴

Sementara itu Belanda giat mengadakan persiapan untuk membentuk Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur, dan Sumatra Timur. Tindakan Belanda ini merupakan suatu pelanggaran di depan KTN karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah RI yang direbut Belanda. Tanggal 03-05 Januari 1948 kabinet RI bersidang terus menerus untuk mencari jalan pemecahan yang baik. Soetan Sjahrir, duta keliling RI dipanggil kembali untuk diminta pertimbangannya, selain itu para pemimpin partai diundang juga untuk menghadiri sidang.

Hasil sidang adalah menolak hasil amandemen Belanda dan sikap penolakan tersebut dibawa sendiri oleh Amir Syariffudin pada tanggal 7 Januari 1948. Kini KTN giat mengadakan perundingan informal dengan masing-masing pihak KTN mendesak RI untuk mendekati tuntutan Belanda karena Belanda tidak mau mundur dariuntutannya. Pada tanggal 9 Januari secara tiba-tiba Belanda mengultimatum RI agar menerima tuntutan secara mutlak dalam tempo tiga hari dan apabila menolak tuntutan maka delegasi Belanda akan meminta intruksi baru dari Den Haag yang artinya akan terjadi peperangan lagi.

KTN yakin bahwa RI akan tetap menolak 12 prinsip politik Belanda, sehingga KTN berusaha menembusi jalan buntu tersebut dengan menambahkan enam pokok tambahan kepada 12 prinsip politik Belanda tersebut. Semua anggota KTN terbang ke Yogyakarta untuk membujuk RI agar mau menerima 12 prinsip politik Belanda dengan enam pokok tambahan dari KTN. Dalam perundingan ini

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 443-444.

pihak KTN menjelaskan dengan panjang lebar mengenai keenam pokok tambahan dari KTN tersebut. Menurut KTN enam pokok tambahan dari KTN itu dapat dijadikan pegangan bagi RI untuk menyelesaikan politik yang menguntungkan RI.

Pihak Indonesia sangat percaya kepada jaminan KTN dalam pelaksanaan enam pokok tambahan tersebut. Pihak Belanda puas karena pada akhirnya RI terpaksa tunduk pada tuntutan Belanda. Tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville maka ditandatangani oleh Amir Syariffudin naskah perjanjian tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Persetujuan Renville.⁴⁵ Sesudah penandatanganan persetujuan tersebut nampaknya para pemimpin-pemimpin republik seperti Soekarno, Hatta, dan Panglima Besar Sudirman sangat setuju dan optimis bahwa persetujuan itu memberikan keuntungan kepada RI.

Namun reaksi terhadap Persetujuan Renville tidak diduga-duga, Masyumi menolak Persetujuan Renville dan menarik menterinya dari kabinet. Tindakan tersebut diikuti oleh PNI sehingga tinggalah partai-partai kecil dan golongan sayap kiri serta PSII yang mendukung kabinet Amir Syariffudin. Pada akhirnya Kabinet Amir Syariffudin tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tanggal 23 Januari 1948 Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Kabinet Amir Syariffudin setelah Amir Syariffudin menyerahkan mandatnya kepada presiden. Presiden menunjuk Moh.Hatta untuk membentuk kabinet presidentil.⁴⁶

Amir Syariffudin sangat kecewa karena sikap Masyumi dan PNI yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya, padahal wakil-wakilnya mereka selalu

⁴⁵ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 175.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 176.

diikutsertakan dalam perundingan-perundingan yang sangat menentukan. Amir Syariffudin juga kecewa karena Frank Graham ditarik dari keanggotaan KTN oleh pemerintah Amerika atas desakan dari Belanda. Dalam kabinet Hatta, Amir Syariffudin tidak duduk di kursi pemerintahan tetapi menjadi pihak oposisi.

C. Amir Syariffudin pada masa setelah menjabat Perdana Menteri

1. Amir Syariffudin dalam Front Demokrasi Rakyat

Sesudah jatuhnya kabinet Amir Syariffudin dengan ditandainya diserahkannya mandat oleh Amir Syariffudin kepada presiden Soekarno, maka sebagai gantinya dibentuklah kabinet presidensial yang menunjuk Moh.Hatta sebagai perdana menteri. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) melakukan demonstrasi agar kabinet tetaplah presidensial dan Amir Syariffudin tidak lagi menjadi perdana menteri. Namun sebaliknya anggota sayap kiri melakukan demonstrasi tandingan dengan tujuan supaya Amir Syariffudin tetap menjadi perdana menteri sekaligus merangkap sebagai menteri pertahanan.⁴⁷ Mohammad Hatta berusaha menarik semua wakil-wakil partai untuk duduk dalam kabinet sehingga kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang kuat dalam menghadapi perundingan dengan Belanda.

Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri menyatakan bersama-sama akan mendukung kabinet Hatta apabila mendapatkan sekurang-kurangnya empat kursi kepada pihak mereka.⁴⁸ Namun hal ini ditentang oleh Masyumi dan PNI menyatakan bahwa apabila tuntutan partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri

⁴⁷ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 179.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 179.

dipenuhi maka mereka tidak mau bergabung ke dalam kabinet Hatta. Pada akhirnya Hatta tidak dapat memenuhi tuntutan Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri sehingga terbentuklah kabinet Hatta tanpa menyertakan Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri.

Setelah kabinetnya jatuh Amir Syariffudin mulai dikelilingi oleh tokoh-tokoh komunis dari sayap kiri seperti Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Setiadjit, dan sebagainya. Dari sini mulailah tokoh-tokoh sayap kiri mulai berusaha menarik Amir Syariffudin ke dalam golongan komunis. Pada suatu rapat umum di Surakarta tanggal 26 Februari 1948, sayap kiri melakukan reorganisasi dan membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang beranggotakan Partai Sosialis dan golongan sayap kiri (PKI, PBI, PESINDO, SOBSI). FDR kemudian memilih Amir Syariffudin sebagai ketuanya dan memiliki program kerja sebagai berikut.

- 1) Menginginkan dibataalkannya Persetujuan Renville.
- 2) Tidak mengadakan perundingan dengan Belanda sebelum mereka mengundurkan diri dari Indonesia.
- 3) Menasionalisasikan semua harta kekayaan milik Belanda dan milik bangsa asing lainnya tanpa ganti rugi.⁴⁹

Selanjutnya FDR menjadi pihak oposisi terhadap kabinet Hatta dan FDR berusaha untuk menjatuhkan kabinet Hatta. FDR berharap dapat menggantikan kabinet presidensil dengan kabinet parlementer. Proses pendemokarsian dalam bidang politik, sosial dan ekonomi adalah penting sekali untuk dilaksanakan. FDR juga menyerukan agar mempertahankan tentara karena kekuatan tentara sangat diperlukan untuk menghadapi tekanan militer Belanda. Perbaikan-perbaikan di

⁴⁹ George M. C Kahin, *op.cit.*, hlm. 328.

bidang ekonomi supaya dijalankan dengan cara ekonomi desa harus didasarkan pada koperasi, mengurangi keuntungan dalam perdagangan, dan melipatgandakan produksi serta bertindak keras terhadap pasar gelap.⁵⁰

Oposisi FDR makin hari makin meningkat dan keras. Walaupun demikian, Hatta masih mengikutsertakan FDR dalam penyusunan suatu program yang disebut “Program Nasional”. Program Nasional ini dimaksudkan agar kelak menjadi dasar bagaimana membentuk kabinet. FDR melihat penyusunan Program Nasional ini merupakan kesempatan untuk dapat kembali menguasai kabinet.⁵¹ Program nasional ini diketuai oleh A.M . Tambunan dengan anggotanya antara lain Sujono Hadinoto, Amir Syariffudin, D.N. Aidit, Setiadjit, M.Saleh Suhaidi dan Maruto Nitimihardjo. Beberapa pokok Program Nasional diantaranya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dengan diterimanya Program Nasioal oleh pemerintah harapan FDR agar dapat berhasil menjatuhkan kabinet Hatta dan menguasai kabinet tidak terpenuhi Hal tersebut disebabkan Masyumi dan PNI menolak adanya perubahan sistem kabinet mengingat keadaan negara masih genting karena ancaman Belanda.

Pada petengahan Juli 1948 FDR merancang program untuk menjatuhkan pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen FDR yang berjudul Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru. Dalam dokumen ini strategi digariskan atas dua fase yaitu dengan memakai cara parlementer dan kalau

⁵⁰ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 180.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 181.

cara ini gagal maka ditempuh cara kedua yaitu dengan memakai cara nonparlementer.⁵²

Seperti yang kita ketahui bahwa FDR sangat berambisi agar pemerintah dapat membubarkan kabinet presidensil Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer yang di dalamnya terdapat Amir Syariffudin sebagai perdana menteri. Dalam hal ini FDR memutuskan apabila pemerintah terus saja menolak membubarkan kabinet Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer maka FDR akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah. Dan kemudian melanjutkan perjuangan FDR di bawah kepemimpinannya sendiri baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintahan yang terpisah. Rencana FDR tersebut tidak diketahui oleh pemerintah hingga pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Barulah pada tanggal 19 September 1948 Kapten Maulana dari Siliwangi menemukan dokumen tersebut dari lemari Amir Syariffudin di rumahnya.⁵³

Rencana Amir Syariffudin dengan pemimpin FDR lainnya berjalan di luar apa yang diharapkan. Pada tanggal 3 Agustus 1948 di Bukit Tinggi tibalah Suripno perwakilan Indonesia di Praha bersama sekretarisnya yang bernama Muso. Setelah Muso diangkat menjadi sekretaris jenderal PKI, ia menganjurkan untuk mendirikan Front Nasional dan semua anggota partai harus bergabung di dalamnya. Kabinet yang sekarang harus dibubarkan dan diganti dengan kabinet nasional yang menteri-menterinya bukanlah wakil-wakil partai tetapi dicalonkan

⁵² *Ibid*, hlm. 183.

⁵³ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 249.

oleh front nasional.⁵⁴ Untuk memperoleh kabinet yang kuat adalah membentuk kabinet front nasional di mana wakil-wakilnya yang paling cakap akan duduk di dalamnya. Muso telah datang membawa intruksi baru dari Moskow.

Muso mulai berusaha untuk meluruskan revolusi Indonesia yang menurutnya selama ini berjalan salah. Ia menyerukan agar semua partai politik mengadakan suatu front nasional bersama demi berhasilnya revolusi Indonesia. Golongan sayap kiri dan juga Partai Sosialis menyetujui seruan dari Muso dan kemudian bersama-sama meleburkan diri ke dalam PKI. Pada tanggal 29 Agustus 1948 Amir Syariffudin mengeluarkan pernyataan bahwa ia telah menjadi komunis sejak tahun 1935 ketika Muso mendirikan PKI ilegal di Surabaya.

Pengakuan Amir Syariffudin sangat mengagetkan umum, namun para pemimpin Indonesia nonkomunis seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berpendapat bahwa Amir Syariffudin sebelumnya bukanlah anggota PKI meskipun ia mempunyai hubungan dengan PKI ilegal. Amir Syariffudin bukanlah seorang komunis tetapi seorang nasionalis. Pengakuan Amir Syariffudin saat ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena kekecewaannya kepada Amerika Serikat dan oportunisme politik.⁵⁵

Pada tanggal 27-28 Agustus diadakan Konferensi PKI, dan pada tanggal 1 September 1948 diumumkan kepengurusan baru PKI yang disebut sebagai Politbiro PKI yang kelak diubah menjadi Front Nasional. Berikut susunan Politbiro PKI.

⁵⁴ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 185.

⁵⁵ George M. C Kahin, *op.cit.*, hlm. 273-274.

- a. Sekretariat Umum : Muso, Maruto Darusman, Tan Lie Djie, Ngadiman.
- b. Sekretariat Urusan Buruh : A. Tjokronegoro, D.N.Aidit, Sutisno.
- c. Sekretariat Urusan Pemuda : Suripno, Wikana.
- d. Sekretariat Pertahanan : Amir Syariffudin.
- e. Sekretariat Propaganda : Alimin, Lukman, Sardjono.
- f. Sekretariat Urusan Organisasi : Sudisman.
- g. Sekretariat Urusan Luar Negeri : Suripno.
- h. Sekretariat Perwakilan : Njoto.
- i. Sekretariat Kader : dipegang oleh Sekretariat Umum.
- j. Sekretariat Keuangan : Ruskak.⁵⁶

Alasan ditunjuknya Amir Syariffudin sebagai sekretariat pertahanan adalah karena Amir Syariffudin mempunyai pendukung yang kuat di kalangan tentara. Pada waktu Amir Syariffudin menjadi menteri pertahanan ia telah membangun pendukung Partai Sosialis dalam kalangan tentara dan kini Muso hendak mempergunakan pendukung Amir Syariffudin guna tujuan PKI.

2. Amir Syariffudin dalam Peristiwa Madiun sampai Akhir Hayatnya

Sesudah peleburan Partai Sosialis ke dalam PKI maka Amir Syariffudin bersama-sama Muso dan pimpinan PKI lainnya menjalankan aksi propaganda didepan para pemuda, buruh dan petani. Muso menyatakan bahwa Rusia adalah pemimpin revolusi dunia dan Indonesia harus berada di bawah Soviet. Kalau di

⁵⁶ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 131.

pihak Rusia kita adalah benar.⁵⁷ PKI juga sangat bertentangan dengan Masyumi serta PNI.

Di daerah Solo terdapat bermacam-macam pasukan, mulai dari laskar pro-sayap kiri (Pesindo) dan pasukan yang pro-Tan Malaka (Barisan Banteng), Pasukan TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) di bawah Letkol Jandau, pasukan Divisi IV Panembahan Senopati, sampai pasukan Tentara Pelajar (TP) di bawah kepemimpinan Achmadi. Selain itu, sejak Februari 1948 datang pasukan-pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat.⁵⁸

Keadaan kota Solo menjadi sangat kacau, terjadilah saling culik menculik dan tuduh menuduh antara PKI dengan Gerakan Rakyat Revolusi (GRR). Masing-masing pihak mengumumkan orang-orangnya hilang dan menuduh pihak yang lainnya yang menculik. Pertentangan itu menjalar menjadi pertentangan antara Divisi Senopati dengan Divisi Siliwangi. Peristiwa pertentangan antara Divisi Senopati dengan Divisi Siliwangi dimulai pada tanggal 11 September, Letkol Suadi menuduh batalyon Siliwanginya Sadikin telah menculik para perwira PKI yang hilang itu, dan menuntut agar mereka dikembalikan pada tanggal 13 September menjelang pukul 14.00 WIB. Pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan dan para korban penculikan tersebut belum dikembalikan, Suadi menyuruh orang-orangnya dari kesatuan TNI untuk menyerang barak-barak Siliwangi.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 209.

⁵⁸ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 233.

⁵⁹ George M. C Kahin, *op.cit.*, hlm. 366.

Keadaan genting Solo menyebabkan Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi gubernur militer di Solo pada tanggal 16 September 1948. Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo pada tanggal 18 September dan ia segera mengeluarkan intruksi bahwa pada pukul 12.00 tanggal 21 September, semua komandan satuan-satuan yang sedang bermusuhan harus melaporkan diri. Komandan yang tidak melaporkan diri dianggap sebagai pemberontakan.⁶⁰ Malamnya, Presiden Soekarno berpidato melalui radio Yogyakarta kepada seluruh rakyat, terutama rakyat Solo. Beliau mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan keras di Surakarta dan berharap bahwa segalanya diselesaikan dengan baik.⁶¹ Sementara ketegangan di Solo berlangsung, para pemimpin PKI seperti Muso, Amir Syarifudin, Wikana, Harjoono, Setiadjit mengadakan perjalanan keliling untuk propaganda partai di seluruh Jawa Tengah dan beberapa kota di Jawa Timur.

Namun selanjutnya terjadi sebuah peristiwa yang tidak diduga oleh para pemimpin PKI telah terjadi di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, pada pagi hari pemberontakan PKI di Madiun dicetuskan oleh Sumarsono dan Djokosujono.⁶² PKI berhasil merebut Madiun dari tangan pemerintah dan mengajak agar PKI di daerah lain mengikuti jejak yang telah diambil oleh PKI di Madiun. Muso dan Amir Syarifudin yang mendengar berita pemberontakan tersebut segera berangkat dari Purwodadi menuju Madiun. Mereka kini tidak

⁶⁰ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 207.

⁶¹ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 240.

⁶² Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 192.

dapat berbuat lain kecuali mendukung dan meneruskan pemberontakan yang telah dimulai tersebut.

Berita pemberontakan di Madiun baru diketahui oleh pemerintah di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1948 sore harinya. Presiden Soekarno atas persetujuan kabinet memberikan kekuasaan kepada Panglima Besar Sudirman untuk menyelamatkan kehidupan negara. TNI segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PKI di Yogyakarta seperti Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Maruto Darusman, dan Ngadiman. Malam harinya Nyonya Amir Syariffudin juga ditangkap. Penangkapan tokoh PKI di kota lainnya segera dilaksanakan. Koran-koran pro-FDR ditutup, SOBSI yang sedang bersidang di Tugu dengan mudah disergap. Esok harinya Panglima Besar Sudirman melaporkan kepada pemerintah bahwa kota Yogyakarta telah diamankan.⁶³

Pada tanggal 19 September 1948 Presiden Soekarno mengucapkan pidato radionya. Soekarno menjelaskan kepada rakyat akan pentingnya persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman Belanda dan pengacau dalam negeri. Ia juga menguraikan tentang kerusuhan yang terjadi di Solo dan akhirnya tentang PKI Muso yang telah mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Pidato tersebut diikuti oleh pidato Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan menyerukan agar rakyat membantu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian kedudukan pemerintah amat kokoh dalam menghadapi pemberontakan karena TNI secara tegas kepada mereka.⁶⁴

⁶³ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 208-209.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 246-247.

Selanjutnya rencana-rencana operasi dipersiapkan oleh Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, dan pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI. Kekuatan PKI melarikan diri ke luar kota, dan TNI terus mengadakan pengejaran. Pada tanggal 30 Oktober 1948 Muso tertembak karena mengadakan perlawanan di Ponorogo. Pada tanggal 29 November 1948 Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo berhasil ditangkap di Priangan, Purwodadi. Djokosujono memberitahukan bahwa Amir Syariffudin dan Suripno juga berada di Purwodadi. Pada hari itu juga jam 20.00 WIB, Amir Syariffudin dan Suripno ditangkap di desa Klambu, 20 kilometer barat daya Purwodadi.

Dengan ditangkapnya Amir Syariffudin dan Suripno maka semua pemimpin pemberontakan telah tertangkap atau tertembak dalam pertempuran kecuali D.N. Aidit yang berhasil melarikan diri ke luar negeri. Dalam keterangannya Amir Syariffudin tidak bermaksud melarikan diri ke daerah yang diduduki oleh Belanda tetapi hendak kembali ke Solo dan terus ke Yogyakarta dengan menyamar sebagai pedagang.⁶⁵

Amir Syariffudin dan Suripno dibawa ke Kudus dan seterusnya diangkut menggunakan kereta api khusus ke Yogyakarta. Amir Syariffudin meminta kepada perwira yang mengurusnya, Kapten Soeharto, untuk memberikan buku. Kebetulan satu-satunya buku yang dimiliki Kapten Soeharto ialah novel Romeo dan Juliet. Selanjutnya Amir Syariffudin membaca buku tersebut sambil menantikan kedatangannya di Yogyakarta. Amir Syariffudin duduk sendiri di

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 370.

kereta api yang sengaja dikosongkan untuknya. Ketika sampai di stasiun Yogyakarta, rakyat tampak berjejal-jejal untuk dapat melihat wajah Amir Syariffudin yang merupakan mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia.⁶⁶

Di Yogyakarta mereka ditahan di Benteng, depan gedung Agung Yogyakarta. Namun jaksa agung berpendapat bahwa itu adalah kewajiban TNI untuk memeriksa mereka. Oleh karena itu mereka dikirim kembali kepada gubernur militer di Solo untuk diperiksa, sebelum diserahkan kepada jaksa agung. Ketika Amir Syariffudin ditahan di Yogyakarta, maka Ds. F.K.N Harahap berusaha untuk menyelamatkan Amir Syariffudin dengan mencoba menghubungi Soekarno dan Hatta. Namun usaha itu gagal karena Amir Syariffudin sendiri tidak menyetujui usaha tersebut.⁶⁷

Pada tanggal 18 Desember 1948 diadakan rapat kabinet untuk membicarakan tindakan apa yang dapat ditempuh kepada para pemimpin-pemimpin PKI jikalau Belanda mengadakan agresi militernya lagi. Dari 12 orang menteri yang datang maka sebanyak empat orang menghendaki agar Amir Syariffudin dan kawan-kawan ditembak mati saja, empat orang lagi berpendapat supaya dipenjarakan namun tidak ditembak mati sedangkan empat orang sisanya tidak memberikan suara. Selanjutnya Presiden Soekarno mengeluarkan vetonya bahwa Amir Syariffudin dan kawan-kawannya tidak boleh ditembak mati juga.⁶⁸

⁶⁶ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 269-270.

⁶⁷ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 531.

⁶⁸ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 198.

Seorang letnan menjelaskan adanya surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto untuk menembak mati Amir Syariffudin beserta pimpinan-pimpinan PKI yang lainnya yang sedang ditahan di Solo. Keputusan ini diambil karena dikawatirkan Amir Syariffudin beserta pimpinan-pimpinan PKI lainnya akan ikut melakukan pemberontakan atau menyeberang membantu Belanda. Amir Syariffudin sebelum ditembak mati meminta agar semua tawanan diberi kesempatan untuk berjanji sebentar. Semua tawanan menulis surat satu per satu dan diserahkan kepada letnan tadi. Sebelum ditembak mati, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu internasional.⁶⁹

Jenazah Amir Syariffudin dan dikuburkan secara massal di daerah Ngalian, sebelah timur kota Solo pada hari Minggu pagi tanggal 19 Desember 1948.⁷⁰ Pemerintah RI belum dapat menyerahkan jenazah-jenazah tersebut kepada keluarganya masing-masing karena Belanda telah menyerang Indonesia dan berhasil menawan para pemimpin Indonesia. Barulah pada tahun 1950 setelah situasi dirasa memungkinkan maka pemerintah menyetujui penggalan kembali jenazah para pemimpin pemberontakan itu dan menyerahkan kepada keluarga masing-masing.

⁶⁹ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 273.

⁷⁰ Frederick D. Wellem, *op.cit.*, hlm. 199.